BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka atau menggarap tanah kosong menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yaitu yang pertama subyek hukumnya hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik sesuai dengan pasal 21 UUPA dan beretikad baik terhadap tanah kosong, obyek hukumnya yaitu tanah kosong yang tidak pernah dihaki sebelumnya, dan syaratnya yang membuka tanah kosong telah membuka atau menggarap tanah kosong tersebut menjadi produktif selama 20 tahun. Kemudian tanah kosong tersebut harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang perwakilan dari pemerintah atau penguasa demi mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, dengan diterbitnya sertipikat hak milik atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka atau menggarap tanah kosong menurut Hukum Islam disebut juga dengan *ihya al-mawat* yaitu dari subyek hukumnya para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i yang membuka atau menggarap tanah kosong hanya diperuntukan bagi umat muslim saja sedangkan Imam Hanafi bebas bagi individu manusia, dari obyek

hukumnya tanah kosong tersebut dijadikan produktif oleh yang membukanya selama 3 tahun menurut implementasi di zaman Umar bin Khattab, dan tanah kosong tersebut menurut Imam Syafi'i tidak perlu didaftarkan kepada pemerintah, sedangkan menurut Abu Hanifah tanah kosong tersebut harus didaftarkan dan menurut Imam Malik bila tanah yang dibuka itu di daerah terpencil dan tidak ada yang tertarik kepadanya maka tidak perlu didaftarkan tetapi jika lokasinya dekat dengan keramaian sehingga banyak orang yang tertarik padanya maka perlu didaftarkan. Akan tetapi pendapat yang valid adalah yang menyatakan bahwa *ihya al-mawat* memerlukan izin atau pendaftaran kepada pemerintah.

2. a. Persamaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka atau menggarap tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam, bagi yang membuka atau menggarap tanah kosong menjadi sebab kepemilikan atas tanah tersebut, adanya jangka waktu untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah kosong, dan cara mendapatkan hak milik atas tanah kosong dengan menjadikan tanah kosong bermanfaat atau produktif.
- b. Perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka atau menggarap tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam, subyek hukum yang mendapatkan hak milik atas tanah bagi yang membuka tanah kosong menurut UUPA hanya warganegara Indonesia dan menurut Hukum Islam hanya umat islam saja yang berhak memiliki hak milik atas tanah tersebut. Jangka waktu membuka atau menggarap tanah kosong untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas tanah selama 20 tahun menurut UUPA, sedangkan menurut Hukum

Islam hanya memerlukan penantian selama 3 tahun untuk mendapatkan pengakuan hak milik. Pendaftaran atau perijinan dari pemerintah di haruskan oleh UUPA untuk mendapatkan hak milik, sedangkan menurut hukum islam tidak wajib ijin atau daftar kepada pemerintah atau penguasa.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah atau penguasa yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional agar mendata dengan cermat dan teliti tentang hak-hak atas tanah di bumi Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain.
2. Pemerintah sebagai penguasa terkuat di negeri ini harus bisa mengelolah fungsi tanah dengan sebaik-baiknya, yang semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
3. Bagi pemegang hak milik atas tanah, jangan mentelantarkan tanah, gunakan tanah tersebut seproduktif mungkin untuk menjaga kelestariannya a dengan menjadikan tanah sebagai lahan pertanian, perkebunan, pembangunan sesuai dengan jenis dan daerah tanah.
4. Bagi seseorang yang telah mendapatkan tanah dengan cara membuka tanah kosong atau turun-temurun atau dengan cara lain yang belum mempunyai sertipikat hak milik atas tanah agar segera mendaftarkannya kepada pemerintah guna mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak.